Prof. Soetandyo Wignyosoebroto:

ISLAMISASI POLITIK ATAU POLITISASI ISLAM?

Beberapa dekade yang lalu hubungan antara ummat Islam dan negara ada jarak. Terbukti dengan dimasukkannya ummat Islam secara keseluruhan sebagai kelompok ekstrim kanan. Anda melihatnya sebagai fenomena apa?

Sebetulnya negara yang dibangun adalah negara nasional, *nation state.* Jadi itu mengambil model-model perkembangan *modern state* yang tumbuh berkembang di Eropa Barat. Yang jelas semenjak abad ke-11 -kalau tidak salah- bermula dari post-Gregorius, terjadi perkembangan pemisahan antara agama yang berotoritas pada rohani ummat dan negara bangsa yang sekular yang mempunyai otoritas secara teritorial pada penduduk, yang berkaitan dengan kemakmuran-kemakmuran duniawi. Model yang diambil di negara-negara bekas jajahan umumnya, adalah model dari negara tuannya yang sekaligus negara gurunya sebetulnya. Karena pendiri-pendiri republik-republik di Asia dan Afrika dulunya belajar di negara-negara penjajahnya. Oleh karena itu **Indonesia juga berkembang sebagai negara bangsa. Dan negara bangsa itu idiomnya cuma satu yaitu persamaan sebagai warga dari suatu negara. Nah umumnya negara-negara seperti ini tidak mau terlalu mementingkan perbedaan-perbedaan seperti perbedaan agama.** Jadi kebinekaan, termasuk agama, jangan mengganggu idiom nasional. Dan dalam riwayatnya, pada awal-awal berdirinya, negara nasional acap kali soal agama ini diketengahkan untuk menggeser makna pentingnya kebangsaan seperti yang terjadi di India. Yang kemudian mengakibatkan gagalnya mendirikan negara nasional Hindustan dan pecah menjadi negara nasional India dan negara yang berdasarkan agama, yaitu Pakistan. Dan riwayat Indonesia, pada awalnya kan juga ada cita-cita seperti Darul Islam itu. Sehingga kecurigaan akan pengislaman suatu negara bangsa muncul. Dan muncul juga kekhawatiran mereka yang tidak Islam akan diperlakukan sebagai warga negara kelas dua. Ya, kekhawatiran seperti itulah yang kemudian tidak memberikan tempat cukup untuk maraknya idiom-idiom Islam di dalam menjawab permasalahan-permasalahan kenegaraan.

Apakah kelompok orang yang ingin menjadikan agama sebagai landasan *nation* kita itu sudah mewakili keseluruhan ummat Islam sehingga ummat Islam seluruhnya harus diperlakukan demikian?

Sebetulnya kalau mengkotakkan ummat Islam secara keseluruhan dalam ekstrim kanan, istilah Jawanya *gebyah uyah*, menyamaratakan. Karena saya juga melihat bahwa tidak semua mereka yang tergolong ummat Islam mencita-citakan Darul Islam *toh.* Saya melihatnya begitu. Banyak juga dari mereka yang melihat negara ini sebagai *darussulh,* kalau sebutan itu boleh dipakai lagi. Negara damai. Jadi sudah enggak urusan dengan negara. Asal ummat ini dalam soal ibadahnya, pelaksanaan syariahnya tidak diganggu. Ini sebetulnya yang menggambarkan bahwa Islam itu adalah persoalan sosial. Tidak berurusan dengan urusan negara, begitu. Ini yang mungkin dulu dikenal sebagai *darussulh* itu. Mungkin dalam negara kolonial dulu -kalau tidak salah- juga tidak ada persoalan dengan pemerintah kolonial Belanda, seperti yang terjadi di Jawa Timur pada abad 20 ini lho ya. Ketika

gubernur dipilihkan orang yang paham betul soal Islam, amtenaar-amtenaar kolonial itu sebelum dikirim ke Hindia Belanda selalu mempelajari *Islamische instalengen,* lembaga-lembaga Islam. Dan dulu gubernur Van der Plas juga berbahasa Arab, dia bekas konsul di Jedah. Tapi ketika Indonesia merdeka, memang ada upaya-upaya tidak hanya bergerak pada sosial kemasyarakatan tapi juga kehidupan kenegaraan. Nah saya tidak tahu, apakah karena soal ini kemudian NU balik ke *khittah.* Itu kan sebetulnya kembali tidak berkaitan dengan persoalan politik tapi dengan ummat kemasyarakatan. Kalaupun NU berpolitik, tidak sebagai partai politik. Artinya, kultur Islam, etika Islam, sesuatu yang Islami hendaknya menjiwai kehidupan kenegaraan. Tapi tidak perlu semua itu harus diislamkan.

Apakah fenomena itu selaras dengan apa yang dikatakan Pak Kunto, misalnya, Islam sebagai ilmu atau ide, bukan Islam sebagai ideologi?

Mungkin. Mungkin searah, karena saya sendiri juga tidak sempat berdialog secara khusus dengan Pak Kuntowijoyo. Tapi saya sendiri juga punya pikiran mungkin kalau tidak sama persis, ya searah, seperti ini. Sebagai dalam amatan-amatan saya yang subyektif, amatan Pak Kunto sedikit banyak juga subyektif, tapi kelihatannya ada kesearahan. Meskipun saya ketika melihat ideologi, adalah ideologi politik. Kalau kemudian masalah Islam sebagai ilmu, itu intelektualitasnya. Intelektualitas yang saya artikan secara lebih luas tidak hanya sisi-sisi pengetahuan atau kognitifnya tapi juga sisi-sisi kearifan-kearifannya. Dus intelektualitas itu selalu meliputi tidak hanya kecerdasan rasional tapi juga kearifan emosional. Tapi mungkin beliau bahasanya lain. Tapi juga ada yang membedakan. Misalnya Gus Dur membedakan "Islam politik" dan "Islam kultural". Kalau Pak Kunto "Islam ilmu" dan "Islam ideologi". Tapi juga nampak -meskipun garis itu tidak jelas benar-, ada nuansa-nuansa tertentu. Nah, saya lihat di lingkungan para kiai, ada suatu studi-studi yang menggambarkan bahwa dalam kehidupan para ulama, ada "ulama advokasi" dan ada "ulama salaf". Meskipun pembedaan ini tidak ketat benar. Dikotomi-dikotomi ini acapkali dimunculkan dalam berbagai studi.

Kalau memang Islam adalah salah satu bagian yang sah dari Orde Baru kenapa tidak dulu-dulu, mengapa tahun 80-an? Ini mesti ada strategi politik yang lebih bersifat instrumental dari pada prinsipil.

Kira-kira mulai tahun 80-an ke sini, mulai ada fenomena yang berbalik arah. Islam telah diakui sebagai salah satu bagian yang sah dalam sistem politik Orde Baru. Bagaimana menurut Anda?

Kalau memang Islam adalah salah satu bagian yang sah dari Orde Baru kenapa tidak dulu-dulu, mengapa tahun 80-an? Ini mesti ada strategi politik yang lebih bersifat instrumental dari pada prinsipil. Saya melihatnya begitu. Kalau Islam adalah bagian yang sah dari perjuangan Orde Baru kenapa tidak sejak tahun 65, 66, 67, kenapa munculnya setelah tahun 80-an, ketika *back up* pada pemerintah tidak bisa diharapkan lagi dari ABRI? Saya sendiri tidak faham ilmu politik, ya. Tapi saya mengamati dan mendengar analisa-analisa para ahli politik. Kenapa pada tahun 80-an, ketika peran ABRI agak terkurangkan di dalam peran-peran politik nasional? Juga mulai dimunculkannya ICMI; kemudian Pak Harto haji. Seolah-olah memperoleh kesahan dari *back up* massa.

Jadi bukan karena perubahan cara pandang terhadap ummat Islam itu sendiri?

Ada yang mengutarakan begitu. Ada pula yang tidak mengatakan begitu. Barangkali juga menarik apa yang dilihat oleh Dr. Deliar Noer dalam suatu wawancara dengan wartawan D&R yang baru saja terbit tentang pengalaman beliau ketika ditawari ikut mem*back up* ICMI dengan ketuanya Pak Habibie. Ia melihatnya ada semacam kisi-kisi bahwa itu memang lebih instrumental dari pada yang prinsipil. Karena kelihatannya untuk kepentingan politik dalam arti ada *back up* Islam tanpa mempermasalahkan apakah kalau semua itu kemudian memberikan posisi pada Islam atau orang muslim lalu berarti bahwa pemerintahan ini menjadi Islami. Tapi lengkapnya baca sendirilah apa yang diwawancarakan dengan Pak Deliar Noer.

Nampaknya Islam yang ideologis, yang mencita-citakan Darul Islam mulai terpinggirkan dan muncul kesadaran baru di dalam cara pandang

terhadap negara. Menurut Anda bagaimana?

Sebetulnya pemikir-pemikir dan tokoh-tokoh Islam memang sedang mencari bentuk. Karena Islam sendiri belum meberikan jawaban mengenai kehidupan bernegara sebetulnya. Karena Islam sendiri turun pada sebuah komunitas suatu masyarakat-masyarakat kecil. Jadi suatu komunitas, bukan suatu *state* dan konsep *nation* juga tidak dikenal. *Ukhuwwah Islamiyah* (persaudaraan Islam), *ukhuwwah wathaniyah* (persaudaraan sebangsa), *ukhuwwah basyariyah* (persaudaraan sesama manusia) itu baru muncul ketika Islam merebak pengaruhnya melampui jazirah Arab memasuki daerah Persia dan memasuki bangsa-bangsa lain, *nation* lain yang berbudaya lain meskipun kemudian kelihatannya akan disatukan dengan *ukhuwwah imaniyah* (persaudaraan seiman). Di Qur'an tidak ada disebutkan *ukhuwwah Islamiyah* dan sebagainya, yang ada *ukhuwwah imaniyah* itu. Saya bercerita pada saat turunnya Qur'an, pada waktu itu. Dus konsep *ukhuwwah Islamiyah, ukhuwwah wathaniyah, ukhuwwah basyariyah* itu lahir kemudian pada zaman khalifah, entah yang Usmaniyah atau Abbasyiyah, saya enggak kenal betul dengan sejarah-sejarah mengenai ini. Tapi saat itu muncul permasalahan-permasalahan yang harus dijawab tidak oleh wahyu atau hadis, tapi oleh proses sejarah itu. Permasalahan-permasalahan, perpecahan-perpecahan di dalam, baik secara fisik maupun perpecahan pemikiran, munculnya pada zaman khalifah-khalifah. Dan banyak sekali praktek-praktek yang kemudian seringkali diutarakan, tetapi itu tidak berasal dari zaman Nabi tapi dari zaman khalifah-khalifah itu. Nah sekarang banyak sekali perdebatan yang mengutarakan apakah ini berasal dari wahyu atau hadis atau berasal dari praktek-praktek kenegaraan setelah masa Nabi. Lebih-lebih ketika model negara ini bukan tradisi-tradisi khalifah tetapi tradisi-tradisi *nation state* Eropa Barat itu. Jadi kalau saya melihat, hal ini merupakan pergulatan-pergulatan pemikiran yang belum selesai. Ketika belum selesai menjawab mengenai persoalan posisi agama di dalam suatu *religion state, nation state* sudah mulai tererosi.

Etikanya boleh dibawa ke atas. Islaminya boleh di bawa ke atas tapi keislamannya barangkali akan menyebabkan mereka yang tidak Islam lalu merasa menjadi minoritas, lalu menjadi warga negara yang selalu dipinggirkan dan sebagainya. Itu menimbulkan hilangnya suatu ukhuwwah basyariahnya

Kita semua hidup dalam masyarakat global dan kian pluralistik betul. Tapi *one world difference*, tapi sulit untuk di*fighted*, satu dunia yang beragam tapi susah untuk dilawan. Di sini diperlukan munculnya pemikiran-pemikiran kontekstual, ijtihad yang dibuka lagi dan sebagainya. Dan mungkin hal-hal seperti itu menjadi bagian dari pemikiran-pemikiran sekarang. Saya melihat belum ada jawaban yang selesai.

Jika Anda melihat seperti itu berarti niatan ummat Islam untuk rujuk dengan negara lebih didasari oleh sebuah pencarian bentuk negara dalam konsep Islam dan itu teologis. Tapi ada orang lain yang melihat itu semata-mata strategi saja. Menurut Anda?

Saya melihatnya, ya strategi-strategi itu. Strateginya negara lho ya.

Maksud saya, strategi kelompok ummat Islam untuk masuk menjadi salah satu bagian dalam proses kenegaraan ini.

Kita bisa melihat yang dimaksud Islam dan Ummat Islam itu siapa? Jadi ini kembali kepada apa yang dikatakan Gus Dur itu. Lha kalau Pak Harto dan Pak Tri menjadi presiden apakah ini juga bukan bagian dari Islam? Apakah yang dinamakan Islam itu ulama-ulama atau kiai-kiai itu? Dan dalam pengalaman, acapkali kiai-kiai dan ulama-ulama itu hanya siap dengan pemikiran-pemikiran ummat pada tingkat ajaran, tapi ajaran yang sangat bersifat mistis seperti itu. Apa bisa dipakai untuk menjadi suatu aturan-aturan dalam kehidupan kenegaraan? Ini yang acapkali menjadi pertanyaan.

Mengenai pendapat bahwa karena mayoritas warga negara kita ummat Islam, maka hendaknya ummat Islam memperoleh peran-peran yang lebih dari yang selama ini mereka terima. Menurut Anda bagaimana?

Saya hanya melihat penggunaan kata mayoritas itu saja. Mayoritas *what sense*, dalam arti apa? Dalam jumlah pemeluknya atau jumlah yang mewakili pemikirannya. Dan mayoritas di mana? Indonesia ini

kan tidak hanya Jawa dan Sumatra. Nanti jangan-jangan Timor Timur mengatakan ini propinsi yang mayoritas Katolik jadi perda-perdanya juga aturan Katolik, itu bagaimana? Oleh karena itu negara nasional itu acapkali mengurangkan perbedaan-perbedaan itu. Tidak akan yang mayoritas itu menguasai yang minoritas. Jadi selalu ada idiom-idiom tertentu. Etikanya boleh dibawa ke atas. Islaminya boleh di bawa ke atas tapi keislamannya barangkali akan menyebabkan mereka yang tidak Islam lalu merasa menjadi minoritas, lalu menjadi warga negara yang selalu dipinggirkan dan sebagainya. Itu menimbulkan hilangnya suatu ukhuwwah basyariahnya. Perekatnya itu *ukhuwwah Islamiyah*nya atau *ukhuwwah basyariah*nya itu. Apalagi kemudian *nation state* itu sendiri sudah mulai tergeser pengaruhnya oleh soal-soal ekonomi. Dalam soal ekonomi dan soal kultur, perbatasan-perbatasan negara sudah mulai mangabur. Kalau dilihat secara global begitu, Islam sudah tidak mayoritas. Jadi menurut saya kuantitas tidak ikut menentukan tapi lebih kita berpikir pada soal kualitas. Karena yang Islami itu tidak selalu dikerjakan oleh orang Islam. Ajaran kebersihan, amar ma'ruf nahi munkar dsb., belum tentu dikerjakan oleh orang Islam. Jadi menurut saya, dalam kehidupan berbangsa asal ajaran Islam itu dikerjakan oleh siapapun, barangkali cita-cita Islam telah terwujud. Sekalipun menteri kesehatan bukan orang Islam tapi ia menegakkan kebersihan lebih saya setujui dari pada itu dipegang oleh orang Islam tapi tidak menegakkannya. Ini kan juga seperti yang diutarakan oleh Pak Deliar Noer, tapi juga pernah ditangkap oleh Pak Nurcholish Madjid bahwa jangan buru-buru mengatakan mayoritas akan menentukan. Sekarang kursi birokrasi elit itu juga diduduki oleh orang Islam tapi itu Islami apa tidak?

Jadi strategi masuk dalam birokrasi atau elit kekuasaan dan melakukan Islamisasi di sana itu harus ditinjau ulang dong?

Kalau bagi saya, ya. Lebih-lebih saya bukan seorang politisi dan saya bukan seorang birokrat. Meskipun saya seorang pegawai negeri tapi kerja saya kan di bidang fungsi. Saya lebih memajukan persoalan-persoalan etika, kearifan, budaya. Kerja guru kan sebetulnya itu. Kerja ulama juga sebetulnya itu dan tidak dalam politik. Bahkan kalau dia itu berkali-kali menaiki tangga istana, mengetuk pintunya umara, ini kan aib juga. Kan umara yang harus datang kepada ulama untuk menanyakan, saya diberi petunjuk apa. Sebetulnya kan yang berharga dari intelektual dan ulama adalah informasi dan etiknya. Bukan posisi dan kedudukannya mengetuk pintunya umara beri saya kedudukan ini, beri saya jabatan sebagai menteri supaya saya ikut ini, itu. Tidak boleh. Ini visi saya yang menuntun saya untuk tidak banyak bergerak di bidang politik tapi mencoba mengetikakan politik. Tidak mempolitikkan etika. Tidak mempolitikkan Islam tapi mengislamkan politik.

Beberapa insiden yang merupakan wujud dari pergolakan masyarakat bawah dan itu adalah ummat Islam, dianggap sebagai anti tesa, bantahan terhadap klaim politik bahwa ummat Islam telah melakukan rujuk dengan negara. Pandangan Anda bagaimana?

Adanya hubungan yang harmonis antara negara dengan ummat Islam itu hanya mitos saja, dan mitos itu harus dihilangkan

Bagi saya, itu konflik-konflik politik, bukan konflik-konflik agama. Karena ada kiai, ada representasi Islam yang kemudian duduk dalam struktur-struktur nasional, katakan saja seperti MUI, Golkar dan sebagainya itu. Itu sebenarnya bagian dari strategi atau *coopted* di dalam suatu struktur. Meminjam apa yang diutarakan oleh ungkapan "sulit ditentukan mana jokinya mana kudanya", siapa joki siapa kuda. Sementara itu ada yang mengutarakan bahwa Islam sedang dibirokratisasikan, sedang distrukturkan. Islam dinamisnya adalah tetap menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Tidak terstrukturkan dalam kehidupan negara. Sebetulnya *encounter* -saya menggunakan istilah *encounter* bukan konflik karena konflik terlalu keras-, *encounter*, bertemunya dua pemikiran yang rebutan unggul. "Apakah Islam itu dijadikan bagian dari kehidupan politik negara, atau tetap sebagai bagian dari kultur dan etika kehidupan masyarakat", masih berlangsung. Karena juga dikhawatirkan kalau Islam menjadi bagian dari negara maka idiom-idiom keagamaanlah yang akan dipakai. *Power contest* dan sebagainya itu akan muncul. Nah, itu akan memecah belah ummat. Sekarang bisa kita lihat, Golkar dan PPP yang sama-sama didukung oleh ummat Islam tawuran. Apakah mungkin lalu membawa-bawa Islam sebagai bendera politik? Maka,

kalau Islam dibawa-bawa dalam kehidupan kenegaraan malah akan memperbanyak konflik-konflik antar ummat itu sendiri.

Kembali kepada corak hubungan ummat Islam dengan negara, sekarang ini yang kelihatan di permukaan, ummat Islam rukun dengan negara yang hanya dalam formalitas politik. Bagaimana menurut Anda?

Adanya hubungan yang harmonis antara negara dengan ummat Islam itu hanya mitos saja, dan mitos itu harus dihilangkan. Kalau saya melihatnya begitu. Kenapa tahun 80-an? Ketika terjadi de-Wahonoisasi di dalam Golkar, dimulai dengan memberikan tempat kepada sipil di Golkar ketika Harmoko masuk di situ. Sebelumnya kan pada kekuatan massa sebetulnya. Ketika massa pecah, sebagian dikuasai oleh Mega, orang sudah mulai berupaya untuk memperkukuh kembali posisi-posisi struktur ini.

Ada kelompok masyarakat Islam yang berharap bisa melakukan demokratisasi, *clean goverment* dan sebagainya karena kedekatan simbolik dengan negara. Menurut Anda bagaimana?

Kalau itu saya bisa setuju. Itu kan sebetulnya mengkomunikasikan suatu kearifan, hendaklah pemerintah *clean*. Tapi untuk membuat suatu *clean* kan sebetulnya tidak hanya soal etisnya, tapi soal-soal langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang belum tentu bisa dijawab dengan strategi-strategi politik dan strategi ekonomi. Tapi kalau posisi-posisi keterdekatan, itu bukan berarti dia diberi posisi kemudian dijinakkan oleh pemerintah, tapi posisi keterdekatan komunikasi-komunikasi dalam arti bahwa *umara*nya bersedia mendengarkan kata-kata ulama atau intelektual Islam. Kesempatan ini pakai saja. Apalagi dipakai untuk menyalurkan informasi, menyalurkan petunjuk, kearifan sebanyak mungkin. Tidak keterdekatan di dalam hal berilah aku posisi-posisi dalam struktur. Saya justru khawatir bahwa ini akan menimbulkan suatu kooptasi-kooptasi tertentu.

Tapi karena ternyata berhadapan dengan negara, kemudian mereka menghendaki ummat Islam enggak usah ikut-ikutan upaya demokratisasi, bagaimana?

Ya, jangan. Sekarang ummat Islam sendiri terutama para pemikirnya harus juga mendiskusikan *what's the meaning of democracy*. Sebab demokrasi tidak dikenal di Islam. Istilahnya sendiri kan tidak berasal dari Islam. Kalau ada bahasa Arab *addimukratiyah* itu kan kemudian saja. Paling-paling dalam Islam yang dikenal kan *syura*. *Syura* itu artinya harus dimusyawarahkan. Dimusyawarahkan oleh siapa? Apa oleh rakyat seluruhnya? Ataukah dimusyawarahkan oleh konsultan-konsultan terentu, konsultasi-konsultasi. Saudi Arabia juga sudah mengaku demokrasi karena dia sudah membuat suatu Dewan Perwakilan dan Dewan Pertimbangan Agung, *Consoultant Assembly*. Tapi apa itu konsep demokrasi yang sesungguhnya? Jadi demokrasi sendiri harus menjadi pergulatan pemikiran di lingkungan Islam sendiri. Sebelum dia ikut mempengaruhi, atas nama Islam, mempengaruhi demokratisasi. Karena konsep demokrasi sebenarnya menjadi bagian dari konsep negara bangsa kalau dilaksanakan secara utuh, suatu paket yang utuh. Negara bangsa itu menjadikan manusia, ummat itu, sebagai warga. Tidak ada *gusti* tidak ada *kawula*. Tidak ada yang dipertuan dan tidak ada yang diperhamba. *Musawah*. Dalam Islam *musawah*. Saya tidak tahu apakah konsep *musawah* ada sejak jaman Islam (Nabi) atau istilah baru, saya tidak tahu.

Ada sejak zaman Nabi.

Kalau memang ada sejak zaman itu ya *musawah* itu dulu. Sebelum demokrasi, masyarakat dipersamakankan dulu. Masyarakat itu *musawah*, kalau orang bisa mengatakan kalau yang punya jabatan presiden dan yang memiliki jabatan supir becak itu sama-sama, setara, *one man one vote*. Jadi bukan kalau presiden *ngunandiko* (bersabda) itu sudah mewakili seluruh rakyat. Lha kalau ummat Islam atau kiai sudah menyatakan "kebulatan tekad" atas nama ummat begitu, *lha wong* saya enggak pernah ditanya kok atas nama ummat, itu bagaimana? Apakah itu suatu demokrasi? Jadi barangkali di kalangan ummat Islam itu disebut demokrasi? Apa betul itu *musawah*?

Tapi setidaknya demokratisasi -yang selama ini ada beberapa ulama yang cukup aktif di dalamnya-, mereka lihat sebagai suatu pilihan sarana yang terbaik dari berbagai alternatif yang tidak sempurna, di dalam mewujudkan beberapa prinsip Islam seperti yang anda sebutkan tadi *al-musawah* (persamaan), *al-'adalah* (keadilan), *attaharrur* (kebebasan) dan sebagainya. Menurut Anda?

Itu prinsip-prinsip demokrasi. Cuma demokrasi harus dijadikan sebagai institusi, itu yang acapkali masih menjadi persoalan. Asas Islam memang begitu. Tapi

asas kan tidak bisa memberikan jawaban purna. Itu kan harus dikembangkan menjadi aturan-aturan yang operasional di dalam sesuatu yang koheren menjadi suatu institusi. Dan sekarang untuk menanamkan faham *al-musawah, al-'adalah* dan sebagainya, bisa apa tidak? Itu dulu. Bagi saya itu merupakan *the bettle of the meaning,* perjuangan pemikiran daripada perjuangan untuk memperoleh posisi dan kedudukan. Tapi lebih menyediakan diri untuk berpikir soal itu dulu. Bagi saya, kuncinya pada *musawah* itu. Karena kesetaraan menjadi penting. Kalau kesetaraan sudah diakui, bisa. Kita sekarang juga harus yakin kepada hadits bahwa ummatku tidak bersepakat untuk sesuatu yang dzalim. Itu kan berarti jika manusia, nuraninya diberikan kesempatan ia selalu memberikan suatu keputusan yang paling baik. Ini kan sama dengan prinsip yang dikembangkan di Eropa Barat ketika dikatakan bahwa suara rakyat adalah "suara" Tuhan. Jadi "suara" Tuhan tidak hanya muncul di dalam wahyu-wahyuNya tapi juga melalui nurani-nurani khalifahNya. Hal-hal seperti itulah yang harus diyakinkan lebih dulu sebagai bagian dari Islamisasi di kalangan ummat sendiri. Saya kira ummat juga menjadi Islami di dalam suatu konteks-konteks kehidupan negara bangsa. Negara bangsa yang nanti juga akan memasuki era global. Malah ia akan tidak saja bertemu dengan sesama manusia tapi juga dengan iman yang berbeda-beda.

Beberapa kelompok Islam yang masih memperjuangkan keyakinan tentang berdirinya negara Islam, dan itu memang ada, dalam kondisi seperti ini masa depan mereka bagaimana?

Saya kira dalam tiap-tiap perjuangan selalu ada kelompok-kelompok yang katakanlah ekstrim kiri, erkstrim kanan begitu ya, yang mempunyai cita-cita yang sangat militan meskipun kadang-kadang tidak realistik. Kelompok-kelompok militan yang tidak realistik, itu selalu ada. Dan persoalannya realistik atau tidak? Kalau saya melihat itu tidak realistik. Lebih-lebih kalau saya melihat yang mereka perebutkan adalah posisi-posisi kekuatan suatu negara yang mana negara nasional akan dijadikan negara agama. Padahal kita juga bisa melihat bahwa negara nasional sekarang juga sudah mengalami masa kalau tidak maghribnya ya masa asarnya, begitulah. Terutama karena kekuatan-kekuatan negara bangsa dalam soal-soal kultur dan politik sangat mundur.

Lalu sejauh mana pengaruh kekuatan-kekuatan ini terhadap corak hubungan antara ummat Islam dengan negara?

Negara sekarang kan tidak hanya menoleh ke dalam, kepada *back up* dari massa yang mayoritas Islam yang bisa didekati dengan ayat-ayat (simbol-simbol, red.). Tapi dia kan harus survive di tengah kehidupan yang global yang harus disapa tidak dengan ayat. WTO itu kan tidak bisa dijawab dengan ayat. Untuk memperjuangkan agar GSP tidak dicabut oleh Amerika itu kan tidak bisa dijawab dengan ayat. Dia mungkin mencari legitimasi masih ke dalam, tapi untuk bisa survive ke luar dia tidak akan survive dengan menguasai ayat-ayat itu.

Menurut Anda kondisi terbaik hubungan negara dengan rakyat yang seperti apa dalam kondisi Indonesia?

Negara jangan terlalu turut campur di dalam kehidupan masyarakat. Sehingga institusi-institusi sosial tidak dikooptasi atau dinasionalisasi. Dengan begitu masyarakat tidak kehilangan sendi-sendi kehidupannya. Boleh dibilang institusi-institusi sosial, bukan institusi politik ya, itu jauh lebih tua dari institusi negara. Republik ini kan baru 52 tahun. Dan institusi-institusi lokal lebih kukuh dan diuji oleh sejarahnya selama berabad-abad. Institusi-institusi itu tidak hanya yang berkembang menurut Islam lho, tapi juga institusi sosial yang lain. Misalnya jika adat dan institusi sosial Bali semua dinasionalisasikan maka Bali akan hilang. Jika pengolahan hutan Kalimantan diambilalih dengan cara-cara moderen, orang Dayak akan hilang. Mati. Karena ia kehilangan institusi. Jadi sebenarnya problem ini tidak hanya mengena kepada masyarakat Islam tapi juga masyarakat yang beragama lain. Yang saya persoalkan adalah institusi-institusinya. Sebenarnya contoh penetrasi secara damai adalah Islam. Ketika Islam memasuki pulau Jawa, ia tidak menghancurkan institusi-institusi yang telah berakar di situ. Meskipun ada warna Hindu di situ, ada warna yang sedikit banyak animistik, tapi Islam mencoba mengikis dan memberikan warna-warna Islamnya. Jadi sedikit banyak *sinkretik*. Maka kemudian ada "Islam Jawa". Tapi ia menyebabkan institusi-institusi itu kuat. Islam sendiri telah memperoleh tempat di situ. Saya khawatir kalau semua itu kemudian dihancurkan, institusi-institusi yang sudah jadi ini, apapun juga bentuknya, masyarakat akan tidak bisa mempunyai keberdayaannya. Dependensinya, ketergantungannya pada suatu supra struktur menjadi besar. Dan menjadi beban juga bagi negara. Seperti anak asuh diurus oleh negara, seolah-olah masyarakat tidak memiliki

keberdayaan lagi dalam mengurus anak-anak asuhnya sendiri. Jadi beban berat bagi pemerintah, dananya juga habis. Sekarang olahraga saja diolahragakan. Bukan memasyarakatkan olehraga, tapi menegarakan olahraga sebetulnya. Sekarang akan membuat *event* olahraga saja menariki dana dari masyarakat. Tapi tidak memajukan kesehatan masyarakat. Kita bisa menjadi juara dunia dalam cabang bulu tangkis tapi anak-anak kita tidak bisa bermain bulu tangkis karena lapangannya sudah hilang semua, membeli *shuttle cock* saja tidak mampu. Itu kan sebenarnya menghilangkan keberdayaan masyarakat kita. Tapi bagi saya semua itu ada tempatnya sendiri-sendiri. Negara silahkan mengurusi hal-hal yang tidak bisa diselesaikan pada tingkat lokal, pada tingkat masyarakat. Oleh karena itu biarlah Islam bergerak memperkuat institusi-institusi sosial sedangkan yang sudah berpolitik janganlah semua itu lalu mengatasnamakan Islam. Karena yang bergerak di situ berasal dari latar kultural dan agama yang berbeda-beda. Dan kekuatan Islam menurut saya berada di jamaahnya.

Jadi lebih tepat pendekatan kultural?

Kalau saya lebih setuju di situ. Ini sebenarnya juga secara mikro refleksi dari pengalaman saya sendiri. Saya ini berdaya kalau menjadi guru, di kalangan mahasiswa. Mereka mau mendengarkan gagasan-gagasan saya dan bisa berdialog dengan saya. Tapi kalau saya pada tingkat politik nasional, saya ini orang pinggiran saja, enggak pernah didengar. Suara saya nyaris tak terdengar. Pada tataran politik yang terdengar keras kan yang cring-cring cring. Suara Islam pada cring-cring nya ini atau tidak? Atau juga yang whus-whus-whus alias kekuatan yang membentak-bentak itu. Tapi kalau suara rakyat nyaris tak terdengar. Karena apa, di atas sana suara rakyat seperti anda dan saya yang di bawah sini, nyaris tak terdengar. Tapi kalau anda di lingkungan jamaah Islam, suara anda nyaring terdengar.

Karena ada kelompok-kelompok Islam yang masuk dalam birokrasi dan ternyata kemudian terkooptasi lalu mendukung negara yang semakin kuat ini...

Itu yang sebenarnya saya pertanyakan. Kalau dia itu di birokrasi, dia bisa mengislamkan birokrasi atau dia terbirokratisasikan. Kalau dia telah menjadi birokrasi kemudian dia bisa menentukan mana yang haram mana yang halal, mana yang bathil mana yang adil, itu baik. Tapi kalau dia ikut permainan politik?

Kalau dia telah menjadi birokrasi kemudian dia bisa menentukan mana yang haram mana yang halal, mana yang bathil mana yang adil, itu baik. Tapi kalau dia ikut permainan politik?

Mereka mengatakan ini masih sebuah proses. Ini semata-mata pembelaan atau..

Saya ndak tahu. Kita saksikan saja bersama. Sebuah proses, sejauh mana proses itu? Dia itu melegitimasi kekuasaan pemerintah, diperalat, digaji, ataukah sebetulnya dia yang bisa mempengaruhi? Dan mempengaruhi, apakah cukup, katakan saja misalnya, presiden naboh beduk, apa cukup itu saja? Apakah itu hanya gerak-gerak luar untuk memperoleh legitimasi atau apa? Apakah mengislamkan birokrasi itu cukup kalau semua pejabat mau naik haji, ataukah sebetulnya mengislamkan pejabat itu berarti bahwa para pejabat sekarang mendengarkan wong cilik? Sekarang mereka senang sekali membuat masjid. Kenapa tidak memberi beasiswa pada anak-anak muslim untuk belajar? Sekolahan-sekolahan Islam kan bisa dilihat sangat menderita. Sementara di dekatnya ada mesjid-mesjid megah. Itu untuk legitimasi saja atau memang dia akan memperkuat Islam dari segi ruh Islamnya atau hanya tubuhnya Islam? Kalau itu dilihat sebagai strategi, ya silahkan saja. Yang jelas mereka telah mendapatkan "apa-apa". Kalau dikatakan itu strategi, ya saya tidak curiga dulu, tidak su'udlon dulu. Mudah-mudahan itu keluar dari nuraninya. Mudah-mudahan kita ketemu di muaranya.

Tapi melihat perkembangan yang terjadi sekarang *kaya*'nya kok kemungkinannya kecil sekali?

Meski saya pegawai negeri, saya bergerak dalam peran-peran fungsi. Dan saya lebih gampang terpolusi daripada saya mempolusi dia. Posisi saya sebagai dosen itu kan kelompok fungsi, bukan kelompok struktur. Sehingga acapkali kearifan-kearifan keilmuan akademik tidak mempengaruhi dekan tapi peraturan-peraturan kepemerintahan yang mempengaruhi studi-studi di sini. Apa yang boleh diajarkan, apa yang boleh diteliti dan apa yang enggak boleh.❐